



Kiprah agroforestri

World Agroforestry Centre (ICRAF) Indonesia

Volume 4, no. 2 - September 2011

daftar isi



- 3 Mengembalikan kejayaan jelutung di hutan gambut
- 6 Agroforestry karet: Kawasan alternatif pelestarian jenis-jenis burung
- 9 *Creating Shared Value (CSV)*: konsep baru dalam dunia usaha
- 11 Cerita sukses seorang guru Sekolah Dasar Negeri di Lubuk Beringin
- 13 RTRW dan distribusi manfaat sumberdaya hutan
- 15 Kunjungan Staf Ahli Menteri Kehutanan Republik Indonesia ke lokasi RUPES di Nagari Paninggahan, Sumatera Barat

Penulis tamu kita kali ini menyuguhkan kisah menarik mengenai jelutung. Orang awam mungkin banyak yang belum tahu bahwa bahan baku permen karet adalah jelutung, tanaman bergetah yang tumbuh di daerah Tanjung Jabung Barat, propinsi Jambi. Namun jelutung kini mulai dirasa menghilang. Bagaimana Dinas Kehutanan Tanjung Jabung Barat menyikapi hal ini?

Selanjutnya kita beranjak ke Simalungun, Sumatera Utara, daerah yang mulai terancam berkurang tutupan hutannya, juga kehidupan burung yang merupakan satwa yg terpengaruh oleh perubahan alam. Hilangnya pohon hutan dan tumbuhan semak membuat sulit burung-burung untuk bersarang dan berlindung. Burung-burung tersebut berjuang harus bertahan hidup dan berkembang biak, sehingga kita masih dapat menikmati suara dan keindahan bulunya.

Menciptakan manfaat bersama, tentunya hal ini yang diharapkan oleh semua umat manusia di dunia. Sebuah konsep dalam dunia usaha juga kami sajikan disini.

Masih tentang manfaat..., sumberdaya alam hutan mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia. Namun bagaimana cara mendistribusikannya dengan baik di berbagai sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan menuju rendah emisi? Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan peluang untuk mencapai pembangunan tersebut.

Sebuah kisah menarik lainnya datang dari Pak Haji Balkaini, seorang guru SDN Lubuk Beringin, yang menyimpan cita-cita tinggi untuk menyekolahkan anak-anaknya ke perguruan tinggi kelak. Ikuti kisah Pak Haji yang juga menjadi seorang penyadap karet yang sukses.

Sebagai penutup, kami menyuguhkan liputan khusus dari Nagari Paninggahan, Sumatera Barat. Kunjungan Staf Ahli Menteri Kehutanan ke Danau Singkarak, yang merupakan pilot model imbal jasa lingkungan berbasis karbon agar dapat diterapkan di lokasi lain di Indonesia. Sebuah kunci kesuksesan adalah menciptakan sebuah upaya bersama yang melibatkan masyarakat yang aktif dan berperan penting dalam pembangunan daerahnya.

Semoga artikel-artikel kami bermanfaat bagi kita semua.

Tikah Atikah



Gunung Halimun, Jawa Barat | foto: Meine van Noordwijk

kiprah *agroforestri*

Redaksional

Kontributor

Dri Handoyo, Asep Ayat, Hesti L. Tata,
Ratna Akiefnawati, Putra Agung, Juprial

Editor

Subekti Rahayu, Jusupta Tarigan, Elok Mulyoutami

Desain dan Tata Letak
Tikah Atikah, Sadewa

Foto Sampul

Rudi Harto Wibowo



World Agroforestry Centre
TRANSFORMING LIVES AND LANDSCAPES

World Agroforestry Centre
ICRAF Southeast Asia Regional Office
Jl. CIFOR, Situ Gede Sindang Barang, Bogor 16115
PO Box 161 Bogor 16001, Indonesia
☎ 0251 8625415; fax: 0251 8625416
✉ icraf-indonesia@cgiar.org
www.worldagroforestry.org/sea

Agroforestri adalah sistem pemanfaatan lahan yang memadukan pohon dengan tanaman lain dan/atau ternak

Kami mengajak pembaca untuk berbagi cerita dan pendapat mengenai agroforestri. Silahkan kirim naskah tulisan (500-1000 kata) disertai foto beresolusi besar. Saran dan kritik juga dapat ditulis didalam blog KIPRAH di <http://kiprahagroforestri.blogspot.com/>

Mengembalikan Kejayaan Jelutung di Hutan Gambut

Oleh Dri Handoyo, Dinas Kehutanan Tanjung Jabung Barat

Kemana jelutung-jelutung tersebut menghilang? Jelutung, tanaman bergetah yang menjadi sumber bahan baku untuk permen karet, pernah menjadi hasil hutan non kayu yang cukup penting bagi sebagian masyarakat di Tanjung Jabung Barat. Tanaman ini pernah menjadi sumber penghidupan masyarakat pada sekitar tahun 1990, namun secara perlahan berangsur menghilang tak berjejak. Tulisan ini merupakan gambaran perjuangan Dinas Kehutanan Tanjung Jabung Barat dalam upaya mengembalikan lagi kejayaan jelutung.

Tanjung Jabung Barat merupakan sebuah kabupaten dari pemekaran Kabupaten Tanjung Jabung. Dengan luas wilayah daratan 5.009,82 Km², lebih dari sepertiganya merupakan areal rawa gambut. Wilayah yang saat ini merupakan areal penggunaan lain dimanfaatkan masyarakat untuk budi daya pertanian dan perkebunan, sementara yang termasuk areal hutan produksi dimanfaatkan untuk hutan tanaman industri (HTI) *pulp*.

Konon, sebelum menjadi wilayah pertanian dan HTI, daerah ini merupakan areal hutan alam yang di dominasi tanaman jelutung rawa alam (*Dyera lowii*). Masyarakat Desa Senyerang, Bram Itam Kanan, Bram Itam Kiri, Serdang Jaya dan Mekar Jaya sempat merasakan nikmatnya hasil getah jelutung yang disadap di hutan. Namun sekarang, sudah tidak ada lagi pohon jelutung, bahkan sudah tidak ditemukan lagi pengumpul getah jelutung.

Pohon jelutung yang tersisa hanyalah di kawasan hutan lindung gambut yang itupun sudah sangat sedikit jumlahnya. Kawasan hutan lindung seluas 15.965 Ha ini telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Sungai Bram Hitam. Namun demikian, kondisi areal yang merupakan eks Hak Pengusahaan Hutan (HPH) saat ini cukup memprihatinkan. Perambahan dan pembalakan dilakukan oleh sebagian oknum masyarakat, dan saat ini sekitar lebih 4.624 Ha telah beralih fungsi menjadi kebun sawit, pinang dan kopi.



Sisa pohon jelutung yang masih ada di Perkebunan Kelapa Sawit | foto: Atiek Widayati

Membangun kesepakatan dengan masyarakat

Konflik dengan masyarakat sempat terjadi saat membangun kesepakatan pengelolaan hutan lindung gambut. Dengan difasilitasi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebuah kesepakatan pun terbentuk dimana hutan lindung gambut yang merupakan kawasan hutan negara harus tetap dipertahankan kondisi alamnya dengan catatan masyarakat tetap dilibatkan dalam pengelolaannya. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dirasa merupakan satu pola pengelolaan yang cukup kondusif bagi dinas kehutanan setempat untuk meminimalisir kemungkinan konflik yang terjadi.

Dalam skema ini, jelutung ditanam diantara tanaman perkebunan yang dikelola masyarakat. Bibit jelutung dan seluruh biaya penanaman ditanggung oleh pemerintah melalui Dinas Kehutanan setempat. Masyarakat diharapkan dapat merawat, memelihara dan mengamankan tanaman jelutung dan mendapatkan hak atas tanaman ini melalui sistem bagi hasil. Tanaman perkebunan masih dapat diusahakan selama satu daur dengan hasil sepenuhnya untuk masyarakat.

Tahun 2009, penanaman pohon jelutung rawa di areal hutan lindung gambut oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mulai dilaksanakan. Penanaman pertama dilaksanakan di wilayah Bram Hitam



foto: Atiek Widayati



Usaha Persemaian tanaman jelutung hasil swadaya masyarakat | foto: Dri Handoyo

Kanan (Parit Selebes, Sejahtera, Patirol, Jawa Bugis, Bone dan Bekawan) seluas 500 Ha. Jelutung di tanam diantara tanaman sawit berumur 1 – 4 tahun, tepatnya pada inter cropping atau titik mata lima tanaman dimaksud. Pengukuran dan pengamatan tim Dinas Kehutanan terhadap 509 pohon yang berumur 11 bulan, menunjukkan tinggi rata-rata pohon jelutung mencapai 111,29 cm dan diameter batang 2,67 cm.

Di Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Betara, tepatnya di Parit Tomo, Parit Lapis Tomo dan Parit Panglong, jelutung ditanam sekitar tahun 2010. Pengukuran terhadap 151 batang berumur 5 bulan tinggi rata-rata mencapai 32,56 cm dan keliling batang rata-rata 2,04 cm. Pelaksanaan kegiatan untuk 2011 direncanakan di Parit Jelutung, Parit Mutiara 1, Parit Mutiara 2, Parit Pemuda dan Parit Tawakal termasuk wilayah administrasi Kelurahan Bram Hitam Kiri Kecamatan Bram Hitam.

Jelutung juga dikembangkan di lahan masyarakat dalam bentuk kelompok. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Kehutanan telah membantu kurang lebih 60 Ha yang meliputi kawasan Desa Senyerang (Parit Ujung Mursit dan Parit Cikpah). Sebelumnya,

kelompok yang dibantu pemerintah ini, kelompok Rimba Lestari, secara swadaya telah melakukan pengembangan jelutung di lahan mereka sendiri. Bibitnya berasal dari pohon induk yang mereka pelihara. Pohon induk ini telah mendapatkan sertifikasi Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Palembang dengan kategori Pohon Benih Teridentifikasi.

Mengapa harus jelutung?

Jelutung rawa atau *Dyera Lowii* tumbuh dengan baik di tanah organosol dengan curah hujan tipe A dan B. Menurut klasifikasi iklim Oldeman, kategori A memiliki bulan basah lebih dari 9 kali berturut-turut dan tipe B memiliki bulan basah 7 hingga 9 kali berturut-turut. Jenis ini tersebar di Wilayah Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Dengan bentuk batang silindris tanpa banir, pohon ini dapat mencapai tinggi 60 meter dengan diameter 260 cm dan batang bebas cabang setinggi 30 meter. Pola cabangnya tidak terlalu rapat. Sebagai tanaman endemik, penanaman jelutung tidak memerlukan manipulasi lahan yang terlalu tinggi karena telah tumbuh dan berkembang secara alami.

Tekstur kayu jelutung halus, warna putih dan serat yang searah. Kayu ini

banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku industri *plywood*, pensil, mainan dan *moulding*. Getahnya merupakan bahan baku permen karet, dll. Dari hasil penelitian Mamat Rahmat dan Bastoni (2007), jelutung dapat disadap pada umur 10 tahun. Studi tersebut juga menunjukkan bawah getah yang dihasilkan sekira 0,36 Kg/pohon dengan interval waktu sadap 7. Informasi dari masyarakat setempat, interval waktu sadap yang mereka terapkan umumnya 3 hari. Jarak antar pohon yang disadap tidak terlalu jauh, dengan pertimbangan kemampuan jelajah si penyadap. Apabila di asumsikan penyadapan getah dalam satu bulan 10 kali, setiap pohonnya dapat menghasilkan getah 3,6 Kg.

Dalam praktek budidaya tanaman jelutung intensif, jarak tanam yang disarankan 5 x 5 meter dengan rata-rata pohon per hektarnya sekira 400 batang. Jumlah pohon yang hidup sampai siap sadap diperkirakan sekitar 80%. Dengan asumsi hasil per batang 3 kg/bulan dan harga getah jelutung sekira Rp 6.500,- per kg, petani bisa memperoleh hasil sebesar Rp 6.240.000,- per bulan.

Kayunya dapat dipanen setelah pohon tidak mampu menghasilkan getah. Kayu jelutung memiliki kualitas dan harga setara dengan kayu meranti. Apabila



(foto: Tonni Asmawan)

diasumsikan volume kayu perbatang rata-rata 2 m³, setiap hektar diperoleh kayu bulat sebanyak 320 batang, maka produksinya sebesar 640 m³/ha. Dengan demikian petani juga akan memperoleh penghasilan dari penjualan kayu yang dapat digunakan modal untuk penanaman kembali.

Secara sosial, budidaya pohon jelutung mulai dari tanam,elihara dan panen getah dapat menyerap tenaga kerja. Melalui perluasan lapangan kerja ini, kesejahteraan dapat meningkat dan masyarakat menyadari fungsi hutan secara nyata. Dengan demikian mereka akan menjaga hutan mereka. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap hutan karena mereka tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan menyebabkan terjadinya perambahan dan pembalakan. Terlebih lagi, masyarakat merasa tertekan karena akses mereka dibatasi oleh larangan-larangan. Dengan demikian mulai dirasa perlu untuk mengubah image petugas yang berwenang yang hanya bisa membuat larangan tapi mulai melibatkan masyarakat mengelola hutan sehingga ikut merasa memiliki dan menikmati fungsi hutan. Jika rasa memiliki dan menyadari fungsi dan manfaat hutan timbul, tanpa perlu komando dari para pemangku kepentingan, masyarakat akan dengan sendirinya melindungi dan mengamankan hutan.

Kendala dan upaya mencari solusi

Upaya rehabilitasi hutan lindung gambut sebagai areal tangkapan air berlangsung bukannya tanpa perlawanan. Masyarakat yang merasa telah mengelola areal tersebut menolak dan merasa pemerintah akan mengambil haknya begitu saja. Sebagian masyarakat juga beranggapan bahwa jelutung tidak dapat menjanjikan. Namun demikian, Dinas tetap berupaya melakukan pendekatan dengan membangun mediasi yang netral melalui lembaga masyarakat yang kredibel. Disamping itu, pendampingan yang kuat terhadap masyarakat dan institusi lokal terus dilakukan untuk mendorong upaya pemulihan fungsi kawasan.

Ancaman terhadap kawasan hutan lindung gambut Sungai Bram Hitam cukup tinggi. Bagian timur dan utara berbatasan langsung dengan pemukiman dan lahan masyarakat, dapat ditempuh lewat darat maupun sungai bram hitam kanan dan kiri yang membelah kawasan ini. Selain itu, tidak adanya organisasi kemasyarakatan di tingkat desa juga menjadi kendala. Pemerintah mengharapkan dengan terbentuknya KPHL Model Sungai Bram Hitam, organisasi tingkat tapak dapat terbentuk sehingga dapat mengurangi ancaman dan gangguan hutan dan

membantu memperkecil celah hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Namun karena keterbatasan SDM, organisasi ini belum dapat terbentuk. Sumber dana pembangunan, status serta bentuk organisasinya juga belum ditetapkan.

Nota kesepakatan yang dibuat bersama masyarakat masih dalam bentuk perjanjian. Karena itu, PERDA perlu segera disusun sehingga masyarakat mempunyai legalitas formal yang lebih kuat. Maka dari itu dinas kehutanan bersama-sama dengan instansi terkait agar mendorong segera terbentuknya Perda yang mengatur tentang pengelolaan hutan bersama masyarakat.

Tantangan yang lebih berat adalah belum adanya pasar getah jelutung. Meski dulu pernah ada, namun karena produksi jelutung di Tanjung jabung barat terhenti, maka pasarpun ikut menghilang. Maka dari itu pemerintah dan para pemangku kepentingan diharapkan dapat membuka peluang pasar, misalnya dengan mencari investor pasar atau mendirikan pabrik/industri pengolahan getah jelutung. Masih panjang perjuangan ini... dan janganlah berhenti sampai disini.

**Penulis adalah Kepala Seksi Perundang-undangan dan Konservasi Alam Dinas Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi.*

Agroforestri Karet: Kawasan alternatif pelestarian jenis-jenis burung

Oleh: Asep Ayat

Cekakak Belukar (*Halcyon smyrnensis*) penghuni agroforest karet Simalungun, Sumatera Utara | foto: Asep Ayat

“Di balik rimbunnya agroforestri karet, tidak hanya pemilik kebun saja yang dapat menikmati hasil getah karet, tetapi berbagai jenis burungpun memperoleh manfaat dari sistem ini. Tercatat sekitar 46 jenis burung ditemukan pada agroforest karet yang diamati di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara”.

Simalungun adalah salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang merupakan penghasil kelapa sawit, karet dan kakao. Tutupan hutan di daerah ini semakin berkurang karena alih fungsi lahan menjadi perkebunan, baik yang dikelola oleh swasta maupun masyarakat. Konversi kawasan hutan menjadi lahan pertanian atau perkebunan menimbulkan berbagai macam masalah diantaranya penurunan kesuburan tanah, erosi, banjir, kekeringan, kepunahan flora dan fauna.

Burung adalah salah satu jenis satwa yang sangat terpengaruh keberadaannya akibat alih guna lahan hutan, terutama pada lahan-lahan monokultur seperti perkebunan kelapa sawit dan karet. Hilangnya pohon hutan dan tumbuhan semak, hilang pula tempat bersarang, berlindung dan mencari makan berbagai jenis burung. Sementara, burung memiliki peran penting dalam ekosistem antara lain sebagai penyerbuk, pemencar biji,

pengendali hama, dinikmati suara dan keindahan bulunya. Bahkan, ada kepercayaan bahwa jenis-jenis burung tertentu dapat menjadi indikator terhadap adanya kejadian alam. Secara teori, keanekaragaman jenis burung dapat mencerminkan tingginya keanekaragaman hayati hidupan liar lainnya.

Namun demikian, upaya konservasi burung selama ini cenderung dilakukan di kawasan-kawasan konservasi, hutan primer atau hutan yang belum terganggu dan hanya ditekankan pada jenis-jenis yang terancam punah saja. Jenis-jenis umum, ataupun jenis yang mendiami hutan sekunder masih kurang diperhatikan.

Sistem pengelolaan lahan dengan model agroforestri, selain ditawarkan untuk mengatasi masalah yang timbul akibat adanya alih-guna lahan juga dapat mengatasi masalah pangan dan ekonomi masyarakat serta sebagai tempat konservasi jenis-jenis burung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi jenis burung pada agroforestri kopi di Sumberjaya, Lampung Barat menyerupai hutan. Bahkan sistem agroforestri kopi di Bali dapat mendatangkan pendapatan dari pemeliharaan burung Anis merah (Kiprah Agroforestri Vol 2 No. 2, September 2009).

Model agroforestri berbasis karet adalah suatu sistem kebun campur yang terdiri dari pohon karet, pohon buah dan kayu, liana, semak serta tumbuhan herba yang tidak dikelola secara intensif oleh pemiliknya. Berbagai jenis tumbuhan yang terdapat pada sistem agroforestri membentuk lapisan-lapisan tajuk sehingga menyerupai ekosistem hutan sekunder. Struktur yang menyerupai hutan sekunder tersebut memungkinkan berbagai jenis burung bersarang di dalamnya ataupun hanya sekedar mendatangi untuk mencari makan. Bahkan, pengelolaan lahan yang dilakukan secara semi intensif dengan

membiarkan berbagai jenis tumbuhan semak memberikan tempat berlindung bagi jenis-jenis burung yang hidup di permukaan tanah. Berbeda halnya dengan perkebunan monokultur milik perusahaan yang dikelola secara intensif, tinggi tajuk relatif seragam dan tidak ditemukan jenis tumbuhan lain di dalamnya, sehingga tidak lagi menyediakan makanan bagi berbagai jenis burung. Apalagi, pembersihan gulma yang dilakukan secara intensif, sehingga lantai kebun sangat bersih.

Ekspedisi untuk mengetahui keragaman jenis burung pada perkebunan karet monokultur milik PT Bridgestone Sumatra Rubber Estate dan *agroforest* karet di sekitarnya dilakukan selama lebih kurang dua bulan. Sebagai pembandingan, pengamatan juga dilakukan di kawasan hutan yang masih tersisa di sekitar perkebunan karet. Pengamatan dilakukan menggunakan sistem jalur (*transect*) yang merupakan salah satu metode dalam perangkat kaji cepat keanekaragaman hayati (*Quick Biodiversity Survey/QBS*) yang dikembangkan oleh ICRAF.

Kekayaan dan Keanekaragaman Jenis Burung

Hasil pengamatan pada suatu hamparan di Kabupaten Simalungun yang terdiri dari hutan, *agroforest* karet dan karet monokultur menemukan 142 jenis burung dari 42 famili. Jumlah tersebut mencakup 122 jenis ditemukan di kawasan hutan, 46 jenis di *agroforest* karet dan 30 jenis di kebun karet monokultur. Berdasarkan komposisi tersebut terlihat bahwa ada jenis-jenis burung hutan yang masih ditemukan pada *agroforest* karet dan karet monokultur.

Hasil perhitungan berdasarkan indeks Shannon, menunjukkan bahwa hamparan di Simalungun ini masih memiliki keanekaragaman jenis burung yang tinggi. Bila dibandingkan dengan kekayaan jenis burung di Pulau Sumatera, Simalungun dan sekitarnya memiliki 24% dari burung di Sumatera dan 8,9% dari jenis burung di Indonesia.

Jumlah jenis burung yang ditemukan pada *agroforest* karet dan karet monokultur jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan di hutan. Alih guna lahan dari hutan menjadi



Gambar 1. Burung yang ditemukan di hutan dan *agroforest*: (1) Pelatuk Besi (*Dinopium javanense*), (2) Belukwutu Gunung (*Glaucidium brodiei*), (3) Kucica Kampung (*Copsychus saularis*), (4) Takur Ungkut-ungkut (*Megalaema haemacephala*) | foto: Asep Ayat

agroforest karet dan karet monokultur merubah struktur dan komposisi vegetasi yang ada dan berpengaruh terhadap keanekaragaman jenis burung. Semakin sedikit komposisi vegetasinya semakin menurun keanekaragaman jenisnya. Hilangnya tutupan hutan yang merupakan habitat bagi berbagai jenis burung, menyebabkan beberapa jenis burung beralih ke *agroforest* karet dan perkebunan monokultur. Meskipun demikian, hanya jenis-jenis yang mampu beradaptasi pada lingkungan yang mampu bertahan hidup. Hal ini dapat dilihat dari penurunan jumlah jenis yang sangat drastis antara hutan, *agroforest* karet dan karet monokultur. *Agroforest* karet dengan komposisi vegetasi campuran dengan pohon buah-buahan (durian, duku, jengkol, manggis, coklat) masih mampu menyediakan sumber makanan dan tempat berlindung bagi

berbagai jenis burung bila dibandingkan dengan karet monokultur.

Komposisi jenis burung

Kajian berdasarkan pola makan (*guild*) memperlihatkan bahwa hutan dan *agroforest* karet memiliki komposisi relatif sama. Jenis yang mendominasi adalah jenis pemakan serangga (*insectivore*) dan pemakan buah (*frugivore*).

Selanjutnya diikuti dengan jenis pemakan madu (*nectivore*), jenis pemakan ikan (*piscivore*), pemangsa (*raptore*), dan pemakan biji-bijian (*granivore*).

Komunitas burung di daerah pengamatan juga sangat jelas menunjukkan adanya percampuran jenis burung yang menyukai daerah tengah hutan (famili *Picidae*,



Burung-burung pengunjung tetap perkebunan karet monokultur: (1) Beluk Ketupa (*Ketupa ketupu*), (2) Cekakak Sungai (*Halcyon chloris*) | foto: Asep Ayat

Capitonidae, *Trogonidae*, *Pittidae*) dengan jenis burung daerah tepi (famili *Pycnonotidae*, *Nectariniidae*, *Sylviidae*, *Laniidae*, *Timaliidae*). Hal ini terjadi karena dalam hamparan ini terdapat habitat berupa ekosistem hutan yang berbatasan dengan ekosistem lainnya yang lebih terbuka.

Komposisi jenis burung berdasar pola makan yang hampir sama antara hutan dan agroforestri karet menunjukkan bahwa agroforestri karet masih merupakan habitat yang masih menyediakan sumberdaya bagi kehidupan beberapa jenis burung hutan. Komposisi yang masih lengkap mulai dari pemakan serangga, pemakan buah, pemakan madu, pemakan ikan, pemakan biji dan pemangsa merupakan penunjuk bahwa ekosistem di dalamnya masih seimbang.

Di hutan ditemukan jenis frugivore (famili *Bucerotidae*, *Capitonidae*, *Columbidae*, *Pycnonotidae*, *Decidae* dan *Chloropsidae*) yang memberikan gambaran bahwa di kawasan ini terdapat bermacam jenis pohon buah. Pohon buah merupakan sumber biji yang membantu proses regenerasi hutan, sementara burung pemakan buah berperan sebagai pemencar biji. Jenis-jenis pohon buah merupakan salah satu indikator ekosistem yang baik. Pohon-pohon berukuran besar yang banyak terdapat di hutan dapat

menyediakan perlindungan, tempat bertengger dan tempat mencari makan bagi banyak jenis burung.

Pada kebun karet monokultur hanya ditemukan 4 komponen yaitu pemakan serangga (*insectivore*), pemakan buah (*frugivore*), pemakan ikan (*piscivore*) dan pemangsa (*raptore*). Berdasarkan komponen tersebut, terjadi perubahan komposisi yaitu hilangnya jenis burung pemakan madu dan pemakan biji-bijian. Madu dan biji-bijian tidak ditemukan lagi pada kebun karet monokultur, sehingga jenis burung tersebut tidak memilih tempat tersebut sebagai habitat atau tidak mampu bertahan hidup sehingga lama kelamaan akan hilang dan punah.

Jenis-jenis yang mendominasi karet monokultur adalah famili *Alcedinidae*, *Pycnonotidae*, *Strigidae*, *Apodidae*, *Sylviidae*, *Cuculidae*, dan *Columbiae*. Kelompok pemakan serangga yang membedakan antara hutan, agroforestri karet dan berasosiasi dengan karet monokultur adalah Merbah Cerucuk (*Pycnonotus goiavier*), Cinenen Kelabu (*Orthotomus ruficeps*), Cinenen Pisang (*Orthotomus sutorius*), dan Cikrak Polos (*Phylloscopus inornatus*). Selain itu, kelompok pemakan serangga dan ikan yang memiliki kelimpahan tinggi pada karet monokultur yaitu cekakak belukar (*Halcyon smyrnensis*) dan cekakak sungai (*Halcyon chloris*).

Jenis burung dari kelompok pemangsa malam yang berfungsi sebagai keseimbangan biologis yang ditemukan pada karet monokultur yaitu beluk ketupa (*Ketupa ketupu*).

Pada perkebunan karet monokultur, kelompok pemakan buah dan biji, Perkutut Jawa (*Geopelia striata*) dan Tekukur Biasa (*Streptopelia chinensis*) yang hidup di permukaan tanah meningkat jumlahnya di lokasi perkebunan karet monokultur. Jenis burung ini umumnya memakan biji rumput-rumputan yang tumbuh di tempat-tempat terbuka seperti jalan kebun. Kelompok pemakan serangga yang hidup di permukaan tanah seperti Bentet Loreng (*Lanius tigrinus*) dan Perenjak Gunung (*Prinia atrogularis*) melimpah di perkebunan karet monokultur. Jenis Mucuna yang digunakan sebagai tanaman penutup tanah (*land cover crop*) menyediakan banyak makanan berupa serangga kecil seperti ulat dan belalang.

Hasil pengamatan menunjukkan adanya peningkatan kelimpahan kelompok tertentu yang berada pada sistem monokultur. Hal ini cenderung akan menyebabkan terjadinya dominasi jenis sehingga keseimbangan ekosistem akan terganggu, apalagi dengan hilangnya kelompok fungsi tertentu.

Creating Shared Value (CSV): konsep baru dalam dunia usaha

Hesti L. Tata

Selama ini, para pengusaha terutama di sektor industri telah mengenal istilah *corporate social responsibility* (CSR) yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat secara luas, yang memiliki nilai strategis dan dipandang sebagai keunggulan kompetitif perusahaan serta dapat menumbuhkan nilai kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan.

Pendefinisian ulang konsep dan istilah CSR dipandang perlu mengingat tanggung jawab sosial bukan hanya kewajiban bagi perusahaan, tetapi juga bagi semua pihak. Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab bagi semua pihak, maka perlu diciptakan manfaat bersama atau *creating shared value* (CSV) sehingga tanggung jawab bersama dapat terbentuk. Menurut Porter & Kramer (2011), CSV merupakan kebijakan dan proses teknis operasional yang meningkatkan nilai-nilai kompetitif perusahaan dan secara bersamaan memajukan kondisi sosial dan ekonomi. Namun, agar tanggung jawab tersebut terjadi secara efektif dan

efisien, maka CSV haruslah diciptakan di setiap tahap rantai bisnis. Misalnya, dalam perusahaan yang bergerak di bidang pangan dan nutrisi, CSV berada pada tiga komponen utama, yaitu: (1) pertanian dan pembangunan berkelanjutan, (2) lingkungan manufaktur dan sumber daya manusianya (SDM), serta (3) produk dan konsumen. Dengan konsep ini, baik perusahaan maupun masyarakat akan mendapatkan manfaat yang sinergis.

Pada mata rantai pertama, pertanian dan petani menjadi fokus utama dalam peningkatan manfaat bersama. Petani dan perusahaan saling terkait sebagai produsen dan konsumen. Pihak pengusaha (dalam hal ini bertindak sebagai konsumen) mau membeli produk pertanian berkualitas tinggi dari petani (produsen), oleh karena itu konsumen perlu meningkatkan pengetahuan petani dengan memberikan pelatihan dan sarana

untuk mencapai kualitas produk yang dibutuhkan. Mendidik petani dan

keluarganya sekaligus meningkatkan pemberdayaan dan kesadaran petani akan pembangunan yang berkelanjutan. Di lain pihak, pengusaha sebagai konsumen harus memberikan harga yang sesuai dengan kualitas barang yang dihasilkan oleh petani dan menghargai usaha yang dilakukan petani dalam memproduksi barang apabila telah memasukkan unsur-unsur pembangunan berkelanjutan.

Pada mata rantai kedua, manufaktur atau industri menciptakan manfaat bersama bagi sumber daya manusia yang bekerja pada sektor industri tersebut. Perusahaan memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai, mendidik karyawan yang trampil dan bermotivasi serta bertanggung jawab, juga merupakan faktor penting dalam menciptakan manfaat bersama.

Melalui produknya, perusahaan tidak hanya mencari untung, tetapi juga berkewajiban untuk mencerdaskan pembeli (konsumen akhir) baik secara



Perkebunan kopi di Lembah
Lembah Masurai, Merangin, Jambi.
Biji kopi yang sudah matang (inset)
| foto: Asep Ayat

langsung melalui produk maupun secara tidak langsung melalui tayangan iklan yang cerdas. Sebagai contoh, bagi industri pangan, menyajikan fakta gizi atau nutrisi yang terkandung dalam produk adalah hal yang sangat penting. Selain itu, pihak perusahaan ditantang untuk menciptakan produk-produk inovatif yang kaya gizi tetapi rendah lemak dan kalori. Pihak konsumen seharusnya kritis dalam memeriksa produk yang hendak dibelinya, baik tanggal kedaluwarsa, kandungan nutrisi, saran penyajian dan layanan produsen terhadap konsumen.

Di Indonesia, tidak seperti CSR, CSV belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun bagi perusahaan, pelaksanaan CSV berarti pemenuhan prasyarat hukum dan kaidah bisnis, serta menjaga keberlanjutan bagi perusahaan. Selain itu yang dimaksud adalah pembangunan pedesaan (khususnya petani), kualitas dan kuantitas air serta gizi masyarakat.

Selain itu, CSV juga berarti menjaga nilai –nilai sosial. Dalam industri pangan yang berkaitan dengan pertanian, nilai-nilai sosial yang dimaksud adalah pembangunan pedesaan (khususnya petani), kualitas dan kuantitas air serta gizi masyarakat.

Konsep CSV ini telah diaplikasikan oleh sebuah sektor industri pangan, yang melibatkan petani sebagai produsen, sebagai produk pertanian kepada pihak industri. Pihak industri memberikan pembelajaran kepada petani untuk dapat meningkatkan kualitas pertanian, seperti kopi dan cacao, sehingga dapat memenuhi kualitas permintaan perusahaan. Selain itu mengadakan pembangunan pedesaan dalam program listrik mandiri biogas bagi peternak sapi.

Seiring dengan sasaran program 'tujuan pembangunan millennium atau Millenium Development Goal (MDG), menciptakan manfaat bersama (CSV)

perlu digerakkan di berbagai sektor usaha. Ini bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan, meningkatkan kesehatan dan menjamin daya dukung lingkungan hidup, mendukung adanya persamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan. Untuk itulah, sebuah perusahaan pangan dan nutrisi terkemuka menyajikan forum diskusi dan berbagi pengalaman dalam CSV guna penguatan kemitraan dalam bidang nutrisi dan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Sebuah inisiasi yang menarik untuk membangun kemitraan antara industri, pemerintah dan masyarakat.

Porter M, Kramer M. 2011. *Creating Shared Value: How to reinvent capitalism – and unleash a wave of innovation and growth*. Harvard Business Review, January-February 2011. Available in the internet. [https://archive.harvardbusiness.org/cia/web/pl/product.seam?c=8062&i=8064&cs=1b64dfac8e4d2ef4da5976b5665c5540]

pojok publikasi

Policy Brief

Menuju Pengakuan "Hutan Nagari" di Nagari Salingka Danau Singkarak

Jomi Suhendri and Putra Agung

Masyarakat Sumatera Barat khususnya Nagari Salingka Danau Singkarak saat ini memiliki peluang untuk mengelola hutan melalui kebijakan hutan desa dan sistem adatnya. Dalam mewujudkan rencana masyarakat Nagari Salingka Danau Singkarak untuk mengusulkan wilayah yang akan dijadikan hutan desa/nagari perlu dilakukan pendampingan yang intensif. Keinginan ini tentu harus mendapat dukungan dari semua pihak, baik itu dari Pemda, DPRD dan LSM. Dengan adanya hutan nagari ini, kelak diharapkan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan.

Meso Debat

Menghubungkan Debat Makro dan Mikro dalam Menyiapkan Strategi REDD Daerah

Martua T Sirait and Putra Agung

Saat ini kita dibanjiri informasi dan debat tentang perubahan iklim, terutama tentang penyebab perubahan iklim dan langkah-langkah pencegahan (mitigasi) dan usaha usaha menghadapi (adaptasi) perubahan iklim. Informasi yang didapatkan dan debat yang kita dengar serta ikuti sangat beragam, mulai dari tataran Global (Makro) yang berbicara tentang tanggung jawab Negara industri/maju dan negara berkembang sampai di tingkat yang sangat kecil di warung kopi, dipinggir hutan (Mikro) yang kadang terjebak pada pemahaman hutan = uang.

Tulisan ini akan menekankan pada proses penyiapan agenda strategi perubahan iklim di daerah yang akan

banyak mewarnai proses perdebatan REDD dalam beberapa tahun kedepan yang merupakan kewajiban

daerah guna mendukung target penurunan emisi nasional 26% (khususnya dari sektor tata guna lahan untuk pertanian dan hutan), dengan mengesampingkan dulu perdebatan insentif REDD serta perdagangan karbon.

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Distribusi Manfaat Sumberdaya Hutan

Putra Agung

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan salah satu atau bahkan satu-satunya peluang untuk mencapai pembangunan rendah emisi. Sebagai suatu institusi (*rule of game*), RTRW tidak terlepas dari permasalahan mendasar yang melandasi proses pembentukannya. Hal inilah yang membuat RTRW sebagai suatu dokumen legal sering kali gagal menjadi acuan pembangunan daerah. RTRW tidak hanya sebatas legalisasi pemanfaatan dan pembagian ruang atas sumberdaya alam (SDA) namun lebih dari itu, karena pada setiap sumber daya alam melekat hak yang berbeda atas manfaat yang berbeda-beda pula. Tulisan ini merupakan opini penulis sebagai suatu identifikasi awal dalam memahami permasalahan distribusi manfaat sumberdaya hutan dan lahan didalam RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat

(Tanjung Barat) dan kebijakan kehutanan pada umumnya. Cara pandang Teori Akses digunakan untuk menguraikan alokasi dan distribusi manfaat sumberdaya hutan dan lahan untuk menuju pembangunan rendah emisi.

Management of Sesaot Forest: Quo Vadis?

Gemma Galudra

Hutan Sesaot terletak di antara DAS Dodokan, di sebelah barat Taman Nasional gunung Rinjani dengan luas area 5.950 ha. Secara administratif, Hutan Lindung. Status ini didasarkan pada pentingnya fungsi hutan sebagai bagian dari DAS yang menyediakan air untuk irigasi skala besar dan air minum bagi masyarakat hilir, khususnya warga Mataram di Lombok Barat dan beberapa daerah di Kabupaten Lombok Tengah.

hutan Sesaot merupakan milik Kecamatan Narmada dan Lingsar Kabupaten Lombok Barat dan dikelilingi oleh 4 desa yaitu Sesaot, Lebah Sempage, Sedau and Batu Mekar. Menurut Keputusan Menteri Pertanian No. 756/Kpts/Um/1982, status dan fungsi hutan Sesaot adalah Hutan Lindung. Status ini didasarkan pada pentingnya fungsi hutan sebagai bagian dari DAS yang menyediakan air untuk irigasi skala besar dan air minum bagi masyarakat hilir, khususnya warga Mataram di Lombok Barat dan beberapa daerah di Kabupaten Lombok Tengah.

Fungsi dan potensi lain dari hutan Sesaot adalah ekowisata. Sejak dekade terakhir, masyarakat Lombok Barat sudah menganggap Hutan Sesaot sebagai bagian dari rekreasi untuk hiking, berkemah dan berbagai kegiatan olahraga air di sekitar air terjun. Konservasi keanekaragaman hayati juga merupakan potensi lain dari Hutan Sesaot yaitu menjadi rumah bagi siamang (*Hylobates*), rusa (*Dama dama*), kera (*Simianus*) dan burung (*Aves*), khususnya burung 'Cabe Lombok' (*Dicaeura mauei*).



Cerita sukses seorang guru Sekolah Dasar Negeri di Lubuk Beringin

Oleh: Ratna Akiefnawati

Yo kiniko sayo lah pueh harga karet di dusun lah besaing. Toke indak lagi sembarang ngasih hargo. Sejak sayo berkawan dengan kawan-kawan dari ICRAF, sayo jadi tahu macem mano membuat getah iluk sehingga hargo meningkat dan sayo biso sekolahkan anak sampai ke Universitas...

Sekarang saya senang, karena harga karet naik pesat. Toke karet tidak lagi sembarang kasih harga. Sejak saya berkawan dengan kawan-kawan dari ICRAF, saya memiliki pengetahuan bagaimana cara mencetak getah yang bagus sehingga harga meningkat dan saya bisa menyekolahkan anak sampai ke Universitas...

Itulah sepenggal ungkapan kebahagiaan Pak H. Balkaini seorang guru SDN di Lubuk Beringin.

Pak Haji, demikian panggilan populernya, adalah seorang pekerja ulet dan tegas. Pendapatannya sebagai seorang guru hanya cukup untuk menghidupi kebutuhan pangan keluarganya. Namun, beliau menyimpan cita-cita yang tinggi, menginginkan anak-anaknya mengenyam pendidikan tinggi kelak. Untungnya beliau memiliki kebun karet warisan dari orang tuanya dan dari usahanya sendiri membeli kebun sedikit demi sedikit. Tahun 1980-an, saat jumlah penduduk di Jambi masih

sangat sedikit, Pak Haji membuka hutan di dekat desanya untuk ditanami karet. Pada saat itu, harga karet sangat rendah sehingga banyak petani karet terjerat kemiskinan.

Meskipun demikian, Pak Haji tak pernah merasa putus asa. Beliau terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan dari kebun karetnya dengan melibatkan diri di berbagai kegiatan dan organisasi, hingga akhirnya beliau dipercaya menjadi ketua kelompok tani. Tak hanya menjadi ketua kelompok tani 'Agro Pores', H. Balkaini juga menjadi ketua pengelola PLTKA (Pembangkit Listrik Tenaga Kincir Air/*Micro Hydro*) yang dikembangkan di Lubuk Beringin.

Dalam rangka memperjuangkan nasib petani karet di desanya, sejak Juni 2010, kelompok Agro Pores yang dipimpinnya melakukan kerjasama perdagangan karet dengan PT. BSRE (Bridgestone Sumatra Rubber Estate). Tentunya, dalam kerjasama ini pihak PT. BSRE memberikan ketentuan



H. Balkaini mempresentasikan hasil kegiatan kelompok yaitu perbaikan kualitas karet | foto: Ratna Akiefnawati

kepada petani untuk memperbaiki kualitas bahan olah karet (bokar) sesuai dengan standar dari PT. BSRE. Kualitas bokar yang dikehendaki PT. BSRE adalah yang bersih, tanpa direndam dan dicampur bahan non-karet.



Kelompok Agro proses menyampaikan hasil kerjanya pada tingkat Kab. Bungo | foto: Ratna Akiefnawati

Bersama kelompoknya yang beranggotakan 10 orang, Pak Haji berusaha memperbaiki kualitas karetnya. Mereka berupaya memproduksi karet bersih, sehingga harga yang diperoleh dari PT. BSRE dengan kadar karet kering (KKK) rata-rata 60-73% menjadi lebih kompetitif.

Namun demikian, komitmennya untuk membantu petani karet terlepas dari jeratan hutang kepada toke terus diuji. Perang harga karet terjadi di desa. Saat mereka mengirim karet perdana ke pabrik, banyak hasutan dengan harga yang menggiurkan serta adanya ancaman keamanan pengiriman karet. Namun karena kelompok Pak Haji bertekad tetap mencoba memperbaiki rantai perdagangan karet yang telah menjerat petani kecil, mereka pantang menyerah, hingga akhirnya buah manis mereka petik. Saat ini, beberapa petani sudah terlepas dari hutang dan harga karet di tingkat pedagang desa mulai transparan.

Cerita keberhasilan perjuangan H. Balkani tersebut disampaikan dalam acara Lokakarya Dinamika Perubahan dan Penggunaan Kawasan Kelola Rakyat yang diselenggarakan oleh ICRAF bekerjasama dengan KKI-WARSI dengan PT. BSRE, LEI, serta Bappeda Bungo. Pak Haji menyebutkan bahwa sejak Juni 2010 hingga Februari 2011, bokar yang telah dijual ke PT. BSRE mencapai 110 ton dengan keuntungan kotor sebesar Rp 2.150.084.938,-. Sebagian keuntungan disisihkannya untuk membeli 1 unit truk yang dapat mengangkut dan mengirim hasil olah karet ke lokasi pabrik PT. BSRE di Sumatera Utara. Perdagangan langsung dan pengiriman ke PT. BSRE pun semakin lancar setiap minggu.

Melihat keberhasilan yang diperoleh H. Balkani dan kelompoknya, banyak petani karet lain yang ikut bergabung dengan kelompok tani Agro Pores. Petani tidak hanya berasal dari desanya saja, namun juga dari desa tetangga. Awalnya, masyarakat hanya memahami kualitas karet berdasarkan beratnya saja, sehingga untuk mengeruk keuntungan lebih, mereka berupaya mendapatkan berat karet yang besar, misalnya dengan merendam karet dalam air untuk periode yang lama, bahkan memasukkan benda non karet ke dalam bokar. Namun, kini mereka berlomba untuk membuat bokar yang bersih dengan kadar karet kering lebih dari 60%.

Pak Haji merasa senang karena usaha yang beliau lakukan memberikan hasil di luar dugaannya. Hingga kini, Pak Haji semakin rajin lagi menyadap karet. Usai Sholat Subuh, Pak Haji bersama istri pergi ke kebun untuk menyadap karet selama kira-kira 2 jam. Kemudian, beliau bersiap mengajar di SDN di Desa Lubuk Beringin yang tak jauh dari rumahnya. Sekembalinya dari mengajar, usai sholat Dhuhur, kembali ke kebun karetnya yang lain untuk mengumpulkan dan menyimpan lateks di gudang. Tak jarang, ia menyempatkan merawat dan menyiangi rumput di kebun karetnya yang lain yang masih belum menghasilkan. Begitulah kegiatan rutinnya setiap hari. Tetap ulet dan berupaya menjadi contoh bagi petani yang lain.



(1) Kegiatan penimbangan bokar secara manual sebelum dikirim ke pabrik (atas). Potongan bokar yang mulai membaik kualitasnya setelah pelatihan, (2) Bokar yang direndam, (3) Potongan bokar yang mulai membaik kualitasnya setelah pelatihan | foto: Ratna Akiefnawati

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Distribusi Manfaat Sumberdaya Hutan

Oleh: Putra Agung

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan salah satu atau bahkan satu-satunya peluang untuk mencapai pembangunan rendah emisi. Sebagai suatu institusi (rule of game), RTRW tidak terlepas dari permasalahan mendasar yang melandasi proses pembentukannya. Hal inilah yang membuat RTRW sebagai suatu dokumen legal sering kali gagal menjadi acuan pembangunan daerah. RTRW tidak hanya sebatas ijin dan legalisasi pemanfaatan dan pembagian ruang atas sumberdaya alam (SDA) namun lebih dari itu karena pada setiap SDA melekat manfaat yang berbeda-beda. Tulisan ini merupakan opini penulis sebagai suatu identifikasi awal dalam memahami proses penyusunan atau revisi RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabar). Cara pandang Teori Akses digunakan untuk menguraikan alokasi dan distribusi manfaat sumberdaya hutan dan lahan untuk menuju pembangunan rendah emisi.

Revisi RTRW sangat lazim terjadi di Indonesia, sebagaimana terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabar). Melalui peraturan daerah (Perda) No. 8 Tahun 2008, Kabupaten Tanjabar melakukan pemekaran kecamatan dari yang semula 5 kecamatan berubah menjadi 13 kecamatan¹. Hal ini berdampak terhadap alokasi dan distribusi manfaat SDA yang tersedia.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kabupaten Tanjabar yang terletak di bagian timur Propinsi Jambi ini memiliki potensi sumberdaya tambang berupa jenis bahan galian yang tersebar di beberapa kecamatan. Potensi pertambangan yang paling dominan adalah minyak bumi, gas dan batubara. Total luas wilayah Kabupaten Tanjabar sekitar 5.009,82 km² dengan wilayah perairan atau laut meliputi 141,75 km² berada pada garis pantai sepanjang + 45 km.

Potensi SDA di kabupaten ini yang tidak kalah penting bila dibandingkan dengan sektor pertambangan adalah sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan. Luas kawasan hutan Kabupaten Tanjabar adalah 246.601,70 ha yang terdiri dari cagar alam seluas 85 ha, Taman Nasional Bukit Tiga Puluh 9.900 ha, hutan lindung gambut 16.995 ha, hutan produksi terbatas 41.995 ha dan hutan produksi tetap 178.605,60 ha².

Seperti yang terjadi di daerah lain di Indonesia, kawasan hutan Kabupaten Tanjabar terancam oleh ekspansi konsesi hutan tanaman industri (HTI),

pembalakan liar dan perkebunan sawit skala besar. Sebagian besar kawasan hutan produksi telah dikelola dalam bentuk hak HTI oleh PT. WKS, PT. RHM dan PT. WT. Untuk sektor perkebunan terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada produksi kelapa sawit dari 10.961,70 ton tahun 2005 menjadi 183.200,70 ton tahun 2007³. Peningkatan produksi ini tentunya berjalan seiring dengan kebutuhan akan lahan perkebunan dan berlawanan arah dengan luas tutupan hutan.

Sementara itu, sumberdaya alam hutan memiliki manfaat tidak langsung bagi kehidupan manusia yang sering kali justru diabaikan demi keuntungan ekonomi semata, sehingga mengakibatkan emisi tinggi dalam

proses alih guna lahan hingga produksi.

Teori Akses dalam Distribusi Manfaat Pengelolaan Sumberdaya Hutan dan Lahan

Jesse C. Ribot dan Nancy Lee Peluso dalam bukunya '*Rural Sociology*' (2003) mendefinisikan 'akses' sebagai kemampuan atau kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu (dalam hal ini sumberdaya alam/hutan). Pertimbangan siapa yang berhak dan yang tidak berhak untuk mendapatkan akses pengelolaan sumberdaya alam atau hutan atau lahan sangat penting dalam proses penyusunan atau revisi RTRW. Terutama bilamana dilihat dengan cara apa dan kapan hal tersebut terjadi.



Prof. Hariadi Kartodihardjo dalam presentasinya mengenai 'Hutan dan Tata Ruang' menggarisbawahi beberapa kelemahan RTRW. Sebagai peraturan perundangan (*rule of game*) pembangunan daerah yang legal, RTRW masih dianggap gagal untuk mewakili kepentingan berbagai pihak dalam hal pendistribusian kesempatan atau izin untuk memanfaatkan sumberdaya alam atau hutan atau lahan.

Kondisi politik-ekonomi memegang peranan penting dalam proses alokasi dan distribusi manfaat sumberdaya. Ketika RTRW tidak mampu mengarahkan dan mengontrol pemanfaatan sumberdaya (*lack of enforcement*), akan terjadi suatu kondisi dimana interaksi aktor atau jaringan (*network*), politik atau kepentingan, pelaksana kebijakan dan pelaku usaha lebih dominan (*web of power*) dan menjadi kontrol "terselubung" dalam distribusi manfaat sumberdaya hutan atau lahan.

Interaksi faktor-faktor tersebut tidak akan pernah seimbang, selalu ada faktor yang dominan tergantung kepada akses yang dimiliki. Pemerintah kabupaten Tanjabar dapat dianggap sebagai institusi yang memiliki kekuasaan dan kontrol yang kuat (*bundle of power*) atas kepemilikan, pemanfaatan, alokasi dan pendistribusian sumberdaya disamping pemerintah pusat. Dilain sisi, individu atau institusi lain seperti masyarakat, swasta, LSM dan lembaga daerah lainnya tetap berusaha untuk menjaga akses terhadap sumberdaya hutan/lahan melalui pemerintah daerah. Ekspansi perusahaan

HTI, misalnya PT. WKS, dan perkebunan skala besar yang ada di Tanjabar dapat dijadikan contoh. Perusahaan skala besar memiliki akses terhadap modal, teknologi, pasar, tenaga kerja, dan informasi, membuat perusahaan tersebut memiliki posisi tawar yang tinggi dalam memperoleh distribusi manfaat sumberdaya hutan/lahan yang pada akhirnya perusahaan akan memperoleh legalitas (*right based access*).

Sama halnya dengan aktivitas pembalakan liar dan pengambilan lahan atau hutan untuk perkebunan dan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat berusaha untuk mendapatkan hak pengelolaan melalui klaim individu atau komunal dan adat yang kadang bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah dan pusat. Hal ini terjadi akibat rendahnya pengakuan, pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan seperti dalam proses penyusunan RTRW karena masyarakat memiliki akses yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan skala besar. Pada akhirnya kondisi seperti ini akan menyebabkan konflik pemanfaatan sumberdaya hutan/lahan.

Permasalahan lain adalah tata kelola kehutanan (*forest governance*) yang tidak baik. Kebijakan distribusi manfaat yang tidak berimbang antara perusahaan besar dengan masyarakat lokal/adat. Hal ini dapat dilihat dari tumpang tindih kebijakan (inkonsistensi) peraturan dan kebijakan

kehutanan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemanfaatan sumberdaya hutan/lahan dengan menggunakan jaring kekuasaan (*web of power*) sering kali merealokasi peruntukan dan fungsi kawasan hutan dan me-redistribusi manfaat atas sumberdaya tersebut. Hal ini juga memberikan dampak yang sangat buruk terhadap pemberlakuan RTRW sebagai arahan pembangunan daerah.

Banyak sekali hal yang perlu untuk diketahui lebih lanjut mengenai rangkaian jaring kekuasaan (*web of power*) dalam penyusunan dokumen RTRW, dan tidak sesederhana apa yang sudah disampaikan. Pemaparan ini hanya sebagian kecil dari permasalahan sektor kehutanan yang melandasi penyusunan RTRW dilihat dengan menggunakan kacamata "teori akses". Harapannya dengan penyusunan RTRW yang lebih partisipatif dan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak (*local approach*) maka pembangunan daerah yang berorientasi kepada keadilan dan keberlanjutan sumberdaya alam dapat tercapai.

¹ RPJM Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2006-2011.

² Rancangan Pembangunan KPH Model Sungai Bram Hitam, Kab. Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi, 2009.

³ A Theory of Access. Jesse C. Ribot and Nancy Lee Peluso. Rural Sociology 68(2). 2003, pp. 153-181.

Foto: Putra Agung



Kunjungan Staf Ahli Menteri Kehutanan Republik Indonesia Ke Lokasi RUPES di Nagari Paninggahan, Sumatera Barat

Maret 2011. Oleh: Juprial

"Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi langsung dari imbal jasa lingkungan dan merupakan model yang nantinya akan kami terapkan di tempat lain. Saya senang sekali ini bisa terlaksana di sini dan berharap petani di sini ke depannya bisa menjadi guru bagi petani di daerah lain jika ini berhasil.", ujar Ibu Dr. Ir. Yetti Rusli, MSc., Staf Ahli Menteri Kehutanan, Bidang Lingkungan.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam dialog bersama para petani yang terlibat di dalam program skema pasar karbon sukarela atau lebih dikenal dengan program *Voluntary Carbon Market* (VCM). Program VCM ini merupakan salah satu kegiatan yang diinisiasi oleh Program RUPES (Rewards for, Use of and Shared Investment in Pro Poor Environmental Services) - World Agroforestry Centre (ICRAF) di Asia Tenggara dan 'CO₂ Operate BV' (perusahaan pembeli karbon asal Belanda). Program ini tepatnya berlokasi di Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Paninggahan merupakan daerah hulu dari Danau Singkarak yang menjadi salah satu danau kebanggaan masyarakat Sumatera Barat. Desa ini dijadikan sebagai pilot model imbal jasa lingkungan berbasis karbon untuk dapat diterapkan di lokasi lain di Indonesia.

Dalam dialog tersebut, staf Ahli Menteri Kehutanan dan rombongan datang didampingi oleh beberapa staf Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat. Selain itu, Dr. Paul Burger dari CO₂ Operate BV dan Dr. Ujjwal Pradhan, Regional Coordinator ICRAF Southeast Asia, ikut hadir.

Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat, Ir. Hendri Octavia, MSi., mengemukakan apresiasinya, "Kegiatan ini kalau bisa tidak hanya dilaksanakan di Singkarak dan Palupuh saja. Saya berharap ini juga bisa dilaksanakan di kabupaten lain di Sumatera Barat, dan saya siap mendukung penuh kegiatan ini. Kegiatan seperti ini merupakan aplikasi

nyata yang selama ini saya inginkan". Ibu Yetti juga meminta agar para petani dapat menjalankan kegiatan ini dengan serius, karena jika ini berhasil akan membawa dampak baik bagi kesejahteraan petani di masa depan dan juga bermanfaat langsung terhadap lingkungan.

Ruang dialog ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengungkapkan kendala-kendala yang mereka hadapi dalam pelaksanaan program VCM di Paninggahan. Beberapa kendala yang disampaikan diantaranya adalah distribusi dana, ketersediaan bibit tanaman, cuaca, dan hama dan penyakit. Para petani berharap pemerintah melalui dinas-dinas terkait dapat membantu dalam

mengatasi kendala-kendala yang mereka hadapi. Namun demikian, mereka tetap berkomitmen untuk terus memaksimalkan usaha mereka dalam mensukseskan program VCM yang telah berjalan selama hampir satu tahun ini.

Dari hasil dialog ini, di masa depan diharapkan ada peningkatan perhatian pemerintah, melalui perubahan kebijakan yang lebih kondusif sehingga dapat mendorong komitmen masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Upaya pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif dan menjadikan masyarakat sebagai aktor utama dapat menjadi kunci kesuksesan.

(1) Dialog dengan petani yang terlibat dalam kegiatan VCM, (2) Lahan VCM di Nagari Paninggahan | foto: Chandra I. Wijaya & Juprial



• Asia-Pacific Forestry Week New Challenges – New Opportunities

7-11 November, 2011
Beijing, China

Dengan mengambil tema "New Challenges – New Opportunity", peserta akan datang untuk bersama-sama memetakan jalur baru lanskap perkembangan hutan di Asia-Pasifik. Melalui 1500-2000 peserta, yang di dalamnya juga ada para ahli di bidang kehutanan, dialog lintas sektoral, perspektif pemuda dan masyarakat sipil, dan perpaduan dari beragam sudut pandang nasional, adat istiadat dan stakeholder, Forestry Week akan membentuk sebuah platform yang unik untuk pemikiran yang dinamis, inspiratif dan kreatif. Sidang pleno dan berbagai macam kegiatan dari para mitra akan memberikan kesempatan untuk menemukan topik yang relevan dari sudut pandang yang baru dan mencari solusi yang inovatif untuk menghadapi tantangan kehutanan saat ini.

The Asia-Pacific Forestry Commission (APFC) ke 24 akan diadakan bersama dengan Forestry Week. The Asia-Pacific Forestry Commission adalah satu dari enam institusi yang disupport oleh FAO. APFC menawarkan sebuah forum bagi negara-negara anggota untuk berbagi pengalaman dalam menghadapi tantangan kehutanan, menyarankan FAO untuk memprioritaskan hutan-hutan di daerah, dan memulai tindakan bersama menghadapi isu-isu penting kehutanan. APFC saat ini terdiri dari 33 negara anggota, yang saling berhubungan antar-pemerintahannya dalam bidang kehutanan.

Informasi lebih lanjut:
<http://www.fao.org/forestry/ap-forestry-week/en/>

• The United Nations Climate Change Conference COP 17 / CMP 7

28 November - 9 Desember 2011
Durban, Afrika Selatan

Konferensi Perubahan Iklim PBB, di Durban tahun ini, akan mempertemukan perwakilan dari tiap negara, organisasi internasional dan masyarakat sipil dari seluruh dunia. Dalam pertemuan ini akan mendiskusikan kemajuan pelaksanaan antara Convention dan Kyoto Protokol, serta Bali Action Plan yang disepakati pada COP 13 pada tahun 2007, dan Cancun Agreement yang dicapai pada COP 16 Desember lalu.

Informasi lebih lanjut:
http://unfccc.int/meetings/cop_17/items/6070.php

• Brawijaya Internasional Agriculture (BIA) 2011

5-8 Desember 2011
Malang, Indonesia

Mahasiswa sebagai salah satu komponen dalam elastisitas akademik perguruan tinggi yang dituntut untuk memiliki peran aktif dalam kehidupan. Brawijaya Internasional Agriculture (BIA) 2011 adalah serangkaian acara internasional yang meliputi Pameran di bidang pendidikan, Seminar, dan Study Lapangan. Untuk memberikan pemahaman tentang pertanian yang berkelanjutan, dalam acara ini diundang para ahli-ahli dari seluruh Indonesia dan juga pembicara dari luar negeri.

Tema dari acara ini adalah Pertanian Berkelanjutan, dengan sub tema:

1. Sistem pertanian organik dan perubahan iklim
2. Prospek produk-produk organik dalam menghadapi perdagangan dunia
3. Pertanian organik dengan menggunakan kembali kearifan lokal

Informasi lebih lanjut:
<http://www.ub.ac.id/en/news/event/detail/brawijaya-internasional-agriculture-%28bia%29-2011.html>

Membangun Kebun Campuran: Belajar dari Kobun Pocal di Tapanuli dan Lampoeih di Tripa

Endri Martini, Hesti Lestari Tata, Elok Mulyoutami, Jusupta Tarigan dan Subekti Rahayu



Buku ini berupaya mengulas sistem kebun campuran yang dikembangkan berdasarkan pengalaman masyarakat lokal di beberapa daerah menurut hasil-hasil penelitian yang dilakukan ICRAF. Sistem kebun campuran yang telah dikelola oleh masyarakat secara turuntemurun seperti "Kobun Pocal" di Tapanuli, Sumatra Utara, dan "Lampoeih" di Tripa, Aceh, diamati dan dikaji dengan tujuan dapat memberi ide-ide baru untuk membangun sistem kebun campuran yang lebih baik.

Bertani dengan sistem kebun campuran merupakan suatu pilihan bagi pihak yang memiliki lahan terbatas, yang berkisar antara 0,25 – 2 hektar. Pilihan tersebut cukup beralasan karena kebun campuran dapat menjadi sumber pendapatan keluarga, juga sumber tanaman obat, bahan bakar, peralatan rumah tangga, serta peralatan kerja dari berbagai tanaman yang tumbuh di dalamnya. Namun demikian, hasil dari tanaman utama di kebun campuran umumnya cukup rendah. Hasil tersebut sebenarnya bisa ditingkatkan jika dilakukan perbaikan pengelolaan kebun tersebut.

Bersama Menjaga Hutan: Upaya Mengurangi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi di Desa Lubuk Beringin

Ratna Akiefnawati, Grace B. Villamor, Farid Zulfikar, Iman Budisetiawan, Elok Mulyoutami, Asep Ayat, Meine van Noordwijk



Sejak tahun 1992, masyarakat Lubuk Beringin telah sepakat untuk menjaga hutan lindung yang berada di wilayah administrasinya. Selain kesadaran akan pentingnya hutan sebagai harta tak ternilai, masyarakat pun menyadari adanya perubahan iklim yang ditandai oleh udara yang semakin memanas yang juga disebabkan karena hutan mereka yang semakin menyempit. Dengan adanya Permenhut No. P. 49/Menhut-II/2008 tentang hutan desa, masyarakat Lubuk Beringin dibantu oleh beberapa LSM yang tergabung dalam Forum Diskusi Multi-Pihak

Muara Bungo menyiapkan prosedur administrasi untuk mendapatkan status hutan desa. Buah manis yang mereka peroleh adalah SK Menteri Kehutanan No. 109/Menhut-II/2009 tentang pemberian hak kelola hutan lindung menjadi hutan desa Lubuk Beringin.

Koleksi publikasi dapat di akses melalui:
www.worldagroforestry.org/sea/publications

Informasi lebih lanjut:

Melinda Firds (Amel)

Telp: (0251) 8625415 ext. 756; Fax: (0251) 8625416

email: icrafseapub@cgiar.org